

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan hasil penelitian pada BAB III, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

Kinerja DPRD Batanghari Tahun 2019-2022 sebagai pembentuk peraturan daerah cukup baik dari beberapa aspek. Kinerja DPRD Batanghari pada tahun 2019-2022 sebagai pembentuk peraturan daerah dapat dilihat pada indikator pengukuran kinerja produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas.

1. Prouktivitas DPRD Batanghari pada tahun 2019-2022 sudah melaksanakan tugas dengan baik meski terdapat beberapa tantangan namun itu bukan menjadi masalah besar bagi DPRD dalam menjalankan tugas sebagai pembentuk peraturan daerah.
2. Responsivitas DPRD Batanghari tahun 2019-2022 dalam menjalankan tugas sebagai legislasi sudah berjalan dengan baik DPRD Batanghari tidak berfokus pada jumlah yang dihasilkan melainkan berfokus pada tujuan dan manfaat dari produk hukum yang dihasilkan.
3. Akuntabilitas DPRD Batanghari tahun 2019-2022 belum bisa berjalan dengan baik tetapi DPRD Batanghari sudah berupaya menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 4.2 Saran

Untuk DPRD Batanghari harus lebih baik dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang dalam membentuk peraturan daerah, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas nya pada masa pandemi maupun pasca pandemi adalah menjadi pembelajaran untuk kedepannya agar bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Meningkatkan kinerja DPRD Batanghari dalam membentuk peraturan daerah perlu melakukan beberapa hal berikut ini :

1. Produktivitas dalam sisi ini DPRD Batanghari harus bisa menghasilkan produk hukum yang lebih banyak lagi dan bisa meningkatkan kualitas sebagai wakil rakyat.
2. Responsivitas dalam sisi ini DPRD Batanghari harus lebih lebih bisa menampung dan menyerap semua aspirasi masyarakat agar bisa lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Akuntabilitas sisi ini DPRD Batanghari dituntut memiliki kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dengan membuat kebijakan sesuai dengan RAPERDA bahkan lebih baik jika melebihi dari RAPERDA asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.